

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Kota Jambi telah terlaksana dengan hasil Partai Demokrat keluar sebagai partai yang memperoleh suara dan kursi paling banyak untuk lembaga perwakilan DPRD Kota Jambi. Selanjutnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kota Jambi merupakan salah satu dari tiga kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh suara terbanyak.¹

Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 di Kota Jambi menunjukkan perubahan pilihan politik warga Kota Jambi terhadap partai politik. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan perolehan suara partai politik pada Pemilu 2009 dan 2014 di Kota Jambi. Partai yang memperoleh suara terbanyak di Kota Jambi Pemilu 2014 adalah Partai Demokrat dan diikuti oleh PDIP. Partai Demokrat pada Pemilu 2009 juga menjadi partai yang perolehan suaranya paling banyak hanya saja perolehan suaranya secara persentase turun dari 30,47% pada Pemilu 2009 menjadi 20,24% pada Pemilu 2014.

Sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak kedua, PDIP mengalami kenaikan perolehan suara dari Pemilu 2009 sebesar 6,88% yaitu dari 10,06% pada Pemilu 2009 menjadi 16,94% pada Pemilu 2014. Kenaikan paling besar perolehan suara partai politik di Kota Jambi pada pemilu 2014 ada pada Partai Gerindra. Pada Pemilu 2009 Partai Gerindra hanya memperoleh suara sebesar 4,34%,

¹Ada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, pasangan Prabowo-Hatta menang di 3 Kabupaten/Kota yakni Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Bungo. Sumber: KPU Provinsi Jambi 2014

sementara pada Pemilu 2014 memperoleh suara sebesar 12,24% atau naik sebesar 8,9%.

Tabel 1.1. Perbandingan Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu 2009 & 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEMILU 2009			PEMILU 2014		
		Perolehan Suara	Persentase (%)	Ranking	Rata-Rata	Persentase (%)	Ranking
1	NASDEM	0	0	0	15,716	5.58	7
2	PKB	5,302	2.99	9	15,306	5.43	9
3	PKS	14,828	8.37	5	13,435	4.77	8
4	PDIP	17,837	10.06	4	47,754	16.94	2
5	GOLKAR	21,987	12.41	3	24,315	8.63	4
6	GERINDRA	7,523	4.24	7	34,514	12.24	3
7	DEMOKRAT	53,998	30.47	1	57,057	20.24	1
8	PAN	32,419	18.29	2	26,221	9.30	5
9	PPP	6,010	3.39	8	15,270	5.42	10
10	HANURA	11,848	6.68	6	18,155	6.44	6
11	PBB	3,533	1.99	10	7,889	2.80	11
12	PKPI	1,957	1.10	11	6,249	2.22	12
Jumlah		177,243	100		281,881	100	

Sumber: KPU Kota Jambi Tahun 2014

Selain partai-partai yang mengalami kenaikan perolehan suara pada Pemilu 2014, juga terdapat partai-partai yang perolehan suaranya menurun. Terdapat 3 (tiga) partai yang perolehan suaranya secara signifikan turun pada Pemilu 2014 yaitu PKS, PAN dan Partai Golkar. PKS pada Pemilu 2009 memperoleh suara 8,37%, sementara pada Pemilu 2014 turun menjadi 4,77%. PAN pada Pemilu 2009 memperoleh 18,29%, sementara pada Pemilu 2014 turun menjadi 9,30%. Partai Golkar pada Pemilu 2009 memperoleh suara 12,41, sementara pada Pemilu 2014 turun menjadi 8,63%.

Naik turun perolehan suara partai politik di Kota Jambi diasumsikan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu secara sosiologis, sosio-psikologis maupun ekonomi. Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan

daerah yang dihuni oleh beragama suku, ras dan agama. Mayoritas penduduk merupakan suku Melayu Jambi, sedangkan suku (suku bangsa) lain yang hidup berdampingan dengan harmonis di Kota Jambi, antara lain: Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Flores, Habib (keturunan Arab), keturunan India, Jawa, Padang, Palembang, Papua, Sunda, dan Tionghoa (Hokhian, Tchiu, Khek, Hainan).² Belum ada data yang pasti terhadap komposisi jumlah suku dan ras di Kota Jambi, tetapi hal yang pasti adalah warga yang tinggal di Kota Jambi terdiri dari berbagai suku bangsa dengan suku melayu sebagai suku mayoritas.

Mayoritas penduduk Kota Jambi beragama Islam yaitu sebesar 87%³ dan mayoritas dari muslim yang ada menganut aliran keagamaan Nahdatul Ulama (NU), hanya sebagian kecil yang menganut aliran Muhammadiyah. Banyaknya warga muslim NU di Kota Jambi tidak serta merta menjadikan perolehan suara PKB menjadi signifikan. Padahal PKB secara historis dan ideologis merupakan representasi politik dari kalangan Nahdiyyin. Dalam dua kali perhelatan Pemilu 2009 dan 2014 perolehan suara PKB konstan pada ranking 9 (sembilan) meski ada trend kenaikan perolehan suara yaitu pada Pemilu 2014 dari 2,99% pada Pemilu 2009 menjadi 5,43% pada Pemilu 2014.

Kondisi sebaliknya justru terjadi pada PAN sebagai partai yang mengartikulasikan kepentingan politik dari kalangan Muhammadiyah, PAN justru memperoleh suara yang jauh lebih tinggi dibandingkan PKB. Pada Pemilu 2009, PAN memperoleh suara sebesar 18,29% dan pada Pemilu 2014 turun menjadi

²Sumber: Website Pemerintah Kota Jambi: <http://jambikota.go.id> diakses pada tanggal 25 Januari 2015

³Kota Jambi Dalam Angka 2014, BPS Kota Jambi

9,3%. Meskipun mengalami penurunan perolehan suara, PAN dalam 2 kali Pemilu di Kota Jambi perolehan suaranya tetap berada diatas PKB.

Paradoks ini diasumsikan disebabkan karena pengaruh kuatnya tokoh politik lokal (*local strongman*) yang memiliki sumber kekuasaan dari silsilah keluarga penguasa, sumber daya dan akses politik-birokrasi. Tokoh politik lokal tersebut menguasai ranah kekuasaan politik, ekonomi, birokrasi, swasta dan tokoh masyarakat. Penelitian Syarif Hidayat⁴ (2006) mengungkap fenomena *local strongman* di Jambi yang didominasi oleh figur Zulkifli Nurdin (ZN) dan Zoerman Manaf (ZM). Pada konteks kekinian muncul aktor kuat baru yakni Hasan Basri Agus (HBA) yang merupakan Gubernur Jambi 2010-2015 dan sekaligus Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Jambi.

Zulkifli Nurdin merupakan anak dari pengusaha kaya di Jambi yaitu Nurdin Hamzah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Zulkifli Nurdin adalah Gubernur Provinsi Jambi 2 (dua) periode dan sekaligus Ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Melalui kekuasaannya dipemerintah dan partai pada periode tahun 2000 s/d 2009, ZN berhasil membangun jaringan hegemoni kekuasaannya pada kepala daerah, birokrasi, swasta dan tokoh masyarakat⁵. Daya tahan dan kemampuan ZN sebagai “orang kuat lokal” dipengaruhi oleh : 1) Akses politik; 2) Jaringan politik; 3) Tidak terkonsolidasinya kekuatan reformis; dan 4) Kemampuan beradaptasi dengan sistem baru⁶. Menguatnya figur ZN, baik secara eksternal maupun internal, telah melahirkan dependensi figuritas dengan pola patron-klien yang

⁴Syarif Hidayat. 2006. *Bisnis dan Politik Di Tingkat Lokal*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 106.

⁵Terdapat 4 poros kekuasaan ZN yakni Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Wakil Gubernur dan Sekda. Hidayat, *Ibid*, Hal. 109.

⁶Melvin P. Hutabarat. 2012. *Fenomena “Orang Kuat Lokal” Di Indonesia Era Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi*. Jakarta: Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Hal. 152-153.

menempatkan ZN sebagai *patron*, sementara kader atau anggota yang lain sebagai *client*⁷.

Salah satu aktor yang menjadi jaring kekuasaannya di awal periode adalah Zoerman Manaf. Zoerman Manaf (ZM) adalah putra gubernur pertama Jambi yang menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi selama 2 periode serta menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi 2005-2009 serta Wakil Ketua DPRD periode 2009-2014 hingga sekarang.

Pada periode kedua, hubungan antara ZN dan ZM memburuk dan hal ini berimbas pada pertarungan ditingkat pemilihan kepala daerah kabupaten/kota. Di Kota Jambi, pada Pilkada Kota Jambi tahun 2008, keluarga ZN mengukung Sum Indra sebagai calon wakil walikota yang merupakan keponakan dari ZN, sementara keluarga ZM mendukung M. Nuzul Prakarsa yang merupakan anak dari ZM. Pada Pilkada Provinsi Jambi keluarga ZN dan ZM juga mendukung pasangan yang berbeda.

Terpilihnya Hasan Basri Agus (HBA) memunculkan kekuatan politik baru di Provinsi Jambi ditengah pertarungan dua keluarga ZN dan ZM. HBA yang pada awalnya naik menjadi Bupati Kabupaten Sarolangun dengan dukungan politik dan dana dari keluarga ZN, berbalik menjadi rival dari keluarga tersebut. Keluarga ZM mendukung HBA maju pada Pilgub 2010 dan kemudian menjadi calon terpilih. Paska menjadi Gubernur Jambi, HBA membangun kekuatan politiknya dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Provinsi Jambi dan mendisain orang-orang dia untuk menjadi bupati/walikota di Provinsi Jambi.

⁷Ahmad Subhan. 2006. *Pergulatan Dalam Proses Pelembagaan Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pada PAN Provinsi Jambi Tahun 1998-2004)*. Yogyakarta: Tesis Magister Politik Lokal & Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada. Hal. 132.

Ketiga tokoh politik ini yaitu ZN, ZM dan HBA memiliki kekuatan di partai politik. Adik ZN yaitu Hazrin Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi sementara keponakannya Sum Indra Ketua DPD PAN Kota Jambi. ZM sendiri merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi serta sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, sementara anaknya M. Nuzul Prakarsa menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Jambi dan Ketua KNPI Provinsi Jambi. Sementara itu, HBA selain menjabat sebagai Gubernur Jambi, memiliki orang kepercayaan yang menduduki tempat strategis seperti Ketua DPRD Provinsi dan Kota Jambi, Bupati Merangin, Wakil Bupati Muaro Jambi serta Bupati Sarolangun.

Pendekatan orientasi terhadap tokoh politik, dipengaruhi oleh afeksi terhadap tokoh politik berhubungan dengan sikap partisan (identitas partai). Semakin kuat pemilih mempunyai afeksi terhadap seorang tokoh partai, maka ia semakin cenderung mengidentikkan diri dengan partai tokoh politik yang bersangkutan. Pada skala nasional, mereka yang suka Megawati Soekarno Puteri akan beridentitas PDIP, yang suka Prabowo Subianto akan beridentitas Partai Gerindra, yang suka Amien Rais akan beridentitas PAN, yang suka Surya Paloh akan beridentitas Partai Nasdem dan yang suka dengan SBY akan beridentitas Partai Demokrat⁸.

Pada konteks lokal, ketiga tokoh politik lokal ini sama-sama memiliki basis massa di Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Penurunan suara PAN di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi diasumsikan karena ZN sebagai figur sentral di PAN sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur dan pindah domisili ke Jakarta.

⁸ Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka. Hal. 432.

Sementara itu, stabilnya perolehan suara Partai Demokrat di Kota Jambi diasumsikan pengaruh ketokohan HBA dan orang-orang kepercayaannya ditingkat masyarakat. Turunnya perolehan suara Partai Golkar di Kota Jambi karena telah menurunnya hegemoni kekuasaan keluarga ZM ditengah masyarakat karena adik kandungnya yaitu Arifien Manaf tidak lagi menjadi Walikota Jambi.

Selain faktor ketokohan politik, konteks masyarakat perkotaan di Kota Jambi ditandai dengan mudah dan cepatnya arus informasi kepada masyarakat. Menjamurnya media massa cetak, elektronik dan jaringan internet, semakin memudahkan warga Kota Jambi untuk mengakses informasi politik. Mudah akses informasi berpengaruh terhadap model perilaku masyarakat. Akses informasi politik yang terbuka dalam bentuk media, diskusi, sosialisasi dan kampanye berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap partai politik, tokoh politik dan penilaian terhadap kinerja pemerintah⁹.

Naiknya perolehan suara PDIP dan Partai Gerindra di Kota Jambi diasumsikan dipengaruhi hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah SBY-Boediono yaitu dimana PDIP dan Partai Gerindra memposisikan sebagai partai oposisi pemerintahan saat itu. Selain itu juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap calon presiden dari PDIP dan Partai Gerindra yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang memiliki karakter antitesa dari presiden SBY¹⁰.

Pendekatan ini dibangun diatas asumsi bahwa seorang pemilih akan memilih partai atau calon bila dengan memilih calon itu sang pemilih merasakan

⁹Saiful Mujani dkk. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika. Hal. 386.

¹⁰Pada skala nasional, Mujani menyampaikan bahwa faktor ekonomi atau *rational choice* menjawab fenomena kemenangan PDIP pada Pemilu 1999, Partai Demokrat pada Pemilu 2009 serta kemenangan SBY pada Pilpres 2004 dan 2009. Mujani, *ibid*, Hal. 360.

hal itu menguntungkan atau memenuhi keinginan pemilih sendiri¹¹. Pendekatan pilihan rasional dalam perkembangannya dibagi menjadi dua ranah yaitu *retrospektif* dan *prospektif*. *Retrospektif* diartikan bahwa pilihan politik didasarkan pada evaluasi atas kebijakan dan kondisi ekonomi-politik pada masa lalu, sementara *prospektif* didasarkan pada kebijakan atau program masa depan yang ditawarkan oleh partai atau kandidat¹².

Selain variabel-variabel diatas, faktor politik uang (*voting buying*) diasumsikan mempengaruhi perilaku memilih. Penelitian Ali Nurdin (2014) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menyimpulkan jika praktik politik uang terjadi antara lain karena adanya persaingan yang sengit di antara dua kandidat terkuat dan pengawasan pemilu yang sangat lemah. Selain itu sikap masyarakat yang relatif permisif terhadap politik uang dan pengertian politik uang yang masih multitafsir ikut memberi kontribusi mengapa politik uang di Kabupaten Pandeglang. Politik uang cenderung dianggap sebagai hal yang biasa baik oleh kandidat pemilu maupun oleh masyarakat pemilih¹³.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang peneliti peroleh, beberapa individu masyarakat ataupun penyelenggara pemilu ditingkat kelurahan yang ditemui oleh peneliti menyampaikan bahwa politik uang terjadi di Kota Jambi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang lalu, hanya saja hal ini tidak dapat dibuktikan secara empiris. Fenomena politik uang akan diteliti seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Jambi.

¹¹ Anthony Down. 1957. *Economic Theory of Democracy*. New York.

¹² Dieter Roth. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit. Hal. 49.

¹³ Ali Nurdin. 2014. *Politik Uang dan Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Gubernur Banten 2011 Di Kabupaten Pandeglang*. Bandung: Disertasi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Hal. 254.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti memilih judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh faktor sosiodemografi, informasi politik, orientasi tokoh politik, identifikasi kepartaian, ekonomi-politik dan politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Jambi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat secara akademis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian tentang perilaku memilih masyarakat Kota Jambi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu politik secara ilmiah, khususnya terhadap teori perilaku memilih (*voting behavior*). Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bagi penelitian lanjutan terkait partisipasi politik dan perilaku memilih di Kota Jambi maupun daerah-daerah lain. Hal ini tentunya membawa khazanah baru bagi kajian ilmu politik di Provinsi Jambi

karena sejauh peneliti ketahui belum ada penelitian tentang perilaku memilih di Jambi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku memilih (*voting behavior*) dalam pemilu selanjutnya pada tahun 2019 maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi. Kedepannya secara praktis dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan terhadap masyarakat guna kepentingan kemenangan Pemilihan Kepala Daerah baik di Kota Jambi maupun referensi bagi daerah-daerah lain dalam Provinsi Jambi

